



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

| | | |
|------------------|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : | III |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2013-2016 (Demisioner) |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Rapat ke | : | 4 (empat) |
| Hari/Tanggal | : | Selasa, 16 Januari 2017 |
| W a k t u | : | Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI |
| Ketua Rapat | : | H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi-VI DPR RI/F-P. Hanura) didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD); 3. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra); |
| Sekretaris Rapat | : | Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI) |
| A c a r a | : | 1. Persiapan Pembahasan Pemberian Pertimbangan terhadap 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 2. Membahas Kinerja BPKN Periode 2013-2016. |
| Hadir | : | 30 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota BPKN Periode 2013-2016 (Demisioner) dibuka pukul 11.00 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat hari ini Selasa, 17 Januari 2017 dalam rangka membahas:
 - a. Persiapan Pembahasan Pemberian Pertimbangan terhadap 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
 - b. Kinerja BPKN Periode 2013-2016.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua BPKN Periode 2013-2016 (Demisioner) untuk memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai tugas dan fungsi serta kinerja BPKN Periode 2013-2016.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Ketua BPKN Periode 2013-2016 (Demisioner).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menilai bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) masih diperlukan keberadaannya untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen. Namun, hal yang lebih penting adalah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Komisi VI DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB.